

Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Isyah Jamiatus Sholihah¹⁾; Neni Nurhayati²⁾; Dendi Purnama^{3) *)}

¹⁾ isyahjami@gmail.com, Universitas Kuningan

²⁾ neni.nurhayati@uniku.ac.id, Universitas Kuningan

³⁾ dendi.purnama@uniku.ac.id, Universitas Kuningan

*) Author Correspondence

Article Info:

Keywords:

A Competence of Village Apparatus;
Internal Control System;
The Quality of Financial Report ;
Utilization of Village Financial System
(Siskeudes);

Article History:

Received : 2020-10-21
Revised : 2020-11-23
Accepted : 2020-12-02

Article Doi:

<http://dx.doi.org/10.22441/profita.2021.v13i3.001>

Abstract

There were irregularities and abuse of authority by village officials in the use of village funds, resulting in manipulation of financial report data which made financial reports unable to be relevant and reliable. This study aims to analyze the effect of village apparatus competence, utilization of the village financial system (siskeudes), and internal control systems on the quality of financial reports. This research method used is descriptive and verification methods. The population in this study were all 35 village governments in Talaga and Maja districts with units of analysis including; village head, head of finance/treasurer, and village consultative body (BPD) which means there are 105 respondents. Determination of the sample in this study using a saturated sample of 105 respondents. Data collection techniques using a questionnaire or questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study found that the competence of village officials, the utilization of the village financial system (siskeudes), and the internal control system had a positive and significant effect on the quality of financial reports.

Abstrak

Adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat desa dalam penggunaan dana desa sehingga terjadi manipulasi data laporan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan tidak dapat relevan dan andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem keuangan desa (siskeudes) dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Metode penelitian ini digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa yang di Kecamatan Talaga dan Kecamatan Maja sebanyak 35 desa dengan unit analisis diantaranya; kepala desa, kaur keuangan/bendahara dan badan permusyawaratan desa (BPD) yang berarti terdapat 105 responden. Penentuan Sampel dalam penelitian menggunakan sampel jenuh yaitu sebanyak 105 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem keuangan desa (siskeudes) dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa; Kualitas Laporan Keuangan; Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (siskeudes); Sistem Pengendalian internal.

How to cite this article:

Sholihah, I., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2020). Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Sistekudes), dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 13(3), 307-320. doi: <http://dx.doi.org/10.22441/profita.v13i3.001>

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, masyarakat dan berbagai sumber daya yang dimiliki serta mengelola keuangan desa. Setiap tahun pemerintah desa menerima bantuan dana desa dari APBN untuk pembangunan desa dan meningkatkan perekonomian desa. Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana desa yang besar, desa diuntut untuk dapat mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan (Setiyawati & Hoesada, 2019). Selain itu, desa dituntut untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa dengan menyusun laporan keuangan pemerintah desa dan menginformasikan kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah desa akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Setiyawati & Hoesada, 2019). Pengungkapan dan penyajian informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan harus relevan dan jujur sesuai kebutuhan para pemakai dengan kata lain laporan keuangan harus berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Sisdianto & Nengsih, 2017). Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: andal (dapat diuji kebenarannya, netral, dan disajikan secara wajar), relevan (mempunyai manfaat umpan balik bagi para penggunanya), dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Rohman et al., 2018). Fenomena pelaporan keuangan pemerintah desa di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut (Julianto & Dewi, 2019). Dari berbagai sumber berita yang dikaji, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah desa masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan salahsatunya adalah penyalahgunaan dana desa (Julianto & Dewi, 2019; Kartika & Firmansyah, 2019; Rohman et al., 2018; Setiyawati & Hoesada, 2019).

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai lembaga independen yang mengawasi dan melaporkan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia mencatat bahwa kasus tindak pidana korupsi terhadap dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat ada 252 kasus korupsi anggaran desa sepanjang 2015-2018, dari 22 kasus pada tahun 2015 dan 48 kasus pada 2016. Kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 98 dan 96 kasus. Objek korupsi ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, pengelembungan anggaran, dan suap. Selain itu, berdasarkan catatan ICW, kepala desa yang terjerat kasus korupsi di desa semakin banyak. ICW mencatat 15 kepala desa melakukan tindakan korupsi pada 2015. Kemudian meningkat menjadi 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018. Jika dijumlahkan, terdapat sedikitnya 231 kepala desa yang terjaring kasus korupsi, akibatnya negara merugi Rp.107,7 miliar sepanjang 2015-2018 (Kartika & Firmansyah, 2019).

Hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi pada pemerintah desa dimana terdapat beberapa pemerintahan desa di Kabupaten Majalengka ditemukan beberapa kasus penyelewangan terhadap dana desa, diantaranya (1) Penyalahgunaan bantuan keuangan pemerintah desa fasilitas peningkatan infrastruktur perdesaan TA 2013 dengan kerugian senilai Rp.100.000.000,- oleh mantan Kepala Desa yang berada di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka (Radarcirebon.com, 2017), (2) Penggelapan dana desa dan manipulasi data. Tahun anggaran 2016 tahap 1 dengan kerugian senilai Rp.85.767.500,- oleh mantan Kepala Desa di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka (Kurniawan & Priyanto, 2019). Namun hal ini

berbanding terbalik dengan pencapaian pemerintah Kabupaten Majalengka yang mengukuhkan sebagai Kabupaten Peraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersering di Provinsi Jawa Barat. Ini setelah diraihnya opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama enam kali (tahun) beruntun. Opini WTP yang kali ini diraih adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 (Radarcirebon.com, 2019).

Berdasarkan beberapa kasus penyelewengan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun Kabupaten Majalengka mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan beberapa pemerintahan desa. Dimana terjadi kasus penyelewengan terkait dengan penyelewengan dana desa sehingga mengakibatkan adanya manipulasi data yang menyebabkan laporan keuangan tidak berkualitas karena dilihat dari karakteristik kualitatifnya laporan keuangan tersebut tidak andal dan relevan. Hal tersebut didukung oleh klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka. Adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat desa menuntut pemerintah desa agar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) (Akhmad et al., 2018). Pemerintah desa dituntut untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan secara transparan dan akuntabel hal ini untuk menjamin bahwa laporan keuangan desa pemerintah desa berkualitas (Puspasari & Purnama, 2018).

Beberapa faktor dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pedesaan, diantaranya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes), dan sistem pengendalian internal (Julianto & Dewi, 2019; Puspasari & Purnama, 2018). Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Agung & Gayatri, 2018; Pramudityo, 2017; Sundari & Rahayu, 2019). Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik (Sundari & Rahayu, 2019). Kurangnya aparatur desa yang memiliki kompetensi dan juga latar belakang pendidikan di bidang akuntansi menjadi kelemahan pemerintah dalam mengelola keuangan desa dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi (Karmila, et.al., 2014). Sundari & Rahayu (2019) dan Rifandi (2019) menemukan bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat diperlukan oleh aparatur pemerintah desa dalam menyusun pelaporan keuangan desa untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Siskeudes juga dapat membantu dan memudahkan pekerjaan kaur keuangan atau bendahara desa secara cepat dan efisien (Wati & Fajar, 2017). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Puspasari & Purnama (2018) menemukan bahwa dengan memanfaatkan sistem keuangan desa, pemerintah desa menjadi lebih efisien dan efektif dalam menyusun laporan keuangan desa sehingga dengan siskeudes diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Penelitian Utama et al. (2017), Rifandi (2019) dan Sundari & Rahayu (2019) menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal menjadi alat control bagi pemerintah desa khususnya dalam penggunaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sistem pengendalian internal dapat menekan pemerintah desa agar mengungkapkan informasi laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Hal ini akan berdampak pada kualitas laporan keuangan desa.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rachmawati, (2017), Sundari & Rahayu, (2019), dan Agung & Gayatri (2018) yang mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Wahyuni (2018) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan dengan objek lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal dalam suatu kontrak dimana pihak agen diberi wewenang untuk mengurus organisasi (Jensen & Meckling, 1976). Implikasi teori ini bahwa pemerintah sebagai agen harus mengungkapkan informasi penggunaan dana desa maupun laporan keuangan desa secara akuntabel dan transparan terhadap masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan guna mengurangi adanya asimetri informasi.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* ini menjelaskan bahwa aparatur pemerintah desa lebih mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu dalam berorganisasi (Donaldson & Davis, 1991). Implikasi teori ini dapat menjelaskan pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan laporan keuangan yang baik sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengaktualisasi diri sebagai pegawai pemerintah yang patuh serta sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Kompetensi Aparatur Desa

Aparatur desa sebagai sumber daya pemerintah desa yang dituntut untuk menjadi sumber daya yang kompeten. Kompetensi dapat diperoleh melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan memungkinkan individu memperoleh berbagai informasi, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Aparatur desa yang kompeten dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kompetensi aparatur pemerintah desa sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas. Aparatur desa yang memahami akuntansi akan meminimalisir pada kekeliruan dan mampu untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Hutapea & Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu (a) Pengetahuan (*Knowledge*), (b) Keterampilan (*Skill*) dan (c) Sikap (*Attitude*). Agung & Gayatri (2018) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian Rifandi (2019), Puspasari & Purnama (2018) dan Nurillah (2014) yang mengemukakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_1 : Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem keuangan desa dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa (Puspawijaya & Siregar, 2016). Fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan *user friendly* agar memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Keberadaannya dapat membantu aparatur pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan desa yang berkualitas. Dengan adanya aplikasi siskeudes dapat membantu pekerjaan penyajian laporan keuangan pemerintah desa lebih efisien dan tepat waktu. Latjandu et al., 2016), dan Puspasari & Purnama (2018), mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berupa siskeudes dapat berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin canggih teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah desa maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Rifandi (2019) dan Julianto & Dewi (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_2 : *Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*

Sistem Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai suatu proses dalam menjalankan prosedur pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian internal digunakan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal menjadi pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas untuk mencapai tujuan kegiatan instansi pemerintahan. Selain itu, sistem pengendalian internal berfungsi untuk menghindari adanya penyimpangan dalam suatu instansi. Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Agung & Gayatri (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H_3 : *Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa di Kecamatan Talaga dan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka sebanyak 35 desa, dengan unit analisis yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga terdapat 105 responden. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Sampel Jenuh (Sekaran & Bougie, 2017; Sugiyono, 2015). Adapun operasionalisasi variabel dapat dijabarkan pada tabel 1. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar

pertanyaan secara terperinci yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian untuk kemudian dibagikan kepada sejumlah responden yang telah ditetapkan (Sekaran & Bougie, 2017; Sugiyono, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (Sugiyono, 2015).

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	No Item	Skala
Kompetensi Aparatur Desa (X ₁)	Kompetensi adalah kapasitas yang dimiliki seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. (Hutapea & Thoha, 2008)	▪ Pengetahuan (Knowledge)	1-3	Ordinal
		▪ Keterampilan (Skill)	4-6	
		▪ Sikap (Attitude)	7-10	
Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (X ₂)	Siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat untuk membantu aparatur pemerintah desa dalam penyusunan pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan. (Puspawijaya & Siregar, 2016).	▪ Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang berlaku	1-2	Ordinal
		▪ Memudahkan tata kelola keuangan desa dan dana desa	3-4	
		▪ Memudahkan dalam penggunaan untuk level pemerintah desa	5-6	
		▪ Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi	7	
		▪ Dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (Built-in Internal Control)	8-10	
Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan suatu proses dalam menjalankan prosedur pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. (PP No.60 Tahun 2008)	▪ Lingkungan Pengendalian	1-2	Ordinal
		▪ Penilaian Resiko	3-4	
		▪ Kegiatan Pengendalian	5-6	
		▪ Informasi dan Komunikasi	7-8	
		▪ Pemantuan	9-10	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. (PP No. 71 Tahun 2010)	▪ Relevan	1-3	Ordinal
		▪ Andal	4-6	
		▪ Dapat dibandingkan	7	
		▪ Dapat dipahami	8-9	

Sumber: Hasil olah data penelitian (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 2 terlihat bahwa hasil uji validitas untuk setiap item pernyataan dari masing-masing variabel menunjukkan lebih besar dari r tabel 0,192 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Kompetensi Aparatur Desa		Pemanfaatan Siskeudes		Sistem Pengendalian Internal		Kualitas Laporan Keuangan	
No item	rhitung	No item	rhitung	No item	rhitung	No item	rhitung
1	0,656	1	0,576	1	0,649	1	0,432
2	0,716	2	0,639	2	0,688	2	0,656
3	0,727	3	0,738	3	0,722	3	0,695
4	0,790	4	0,750	4	0,751	4	0,697
5	0,860	5	0,751	5	0,731	5	0,611
6	0,832	6	0,741	6	0,735	6	0,680
7	0,667	7	0,740	7	0,767	7	0,729
8	0,647	8	0,786	8	0,763	8	0,724
9	0,711	9	0,715	9	0,796	9	0,549
10	0,637	10	0,688	10	0,610	10	

Sumber : hasil olah data output SPSS (2020)

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	N of items	Keterangan
Kompetensi aparatur	0,897	10	Reliabel
Pemanfaatan Siskeudes	0,892	10	Reliabel
Sistem pengendalian internal	0,895	10	Reliabel
Kualiatas laporan keuangan	0,818	9	Reliabel

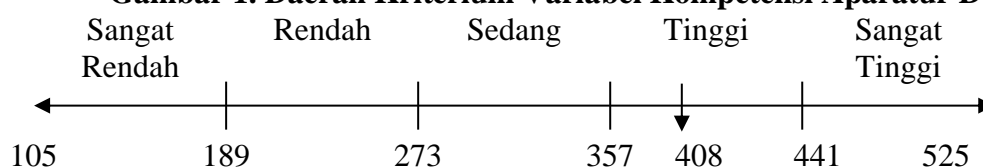
Sumber : hasil olah data output SPSS (2020)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 3, untuk masing-masing variabel menunjukkan lebih besar dari r tabel 0,192 sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

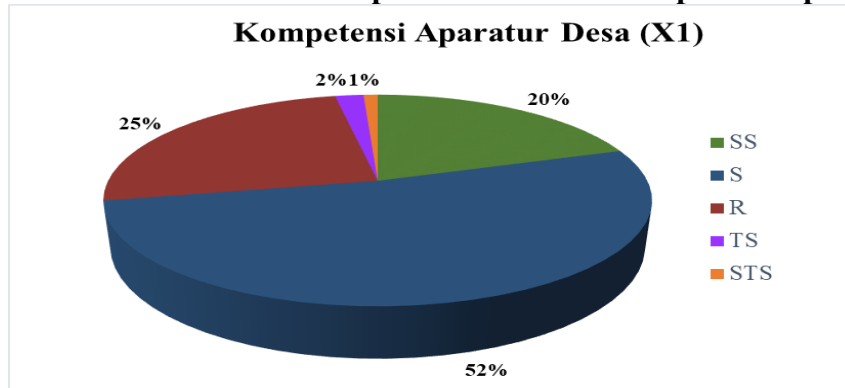
Hasil analisis statistik deskripsi mengenai kompetensi aparatur desa secara visualisasi disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Daerah Kriteria Variabel Kompetensi Aparatur Desa



Sumber: hasil olah data (2020)

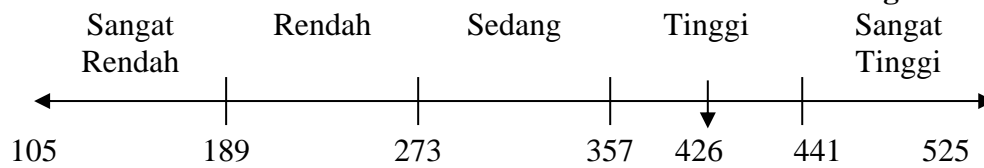
Gambar 2. Persentase Jawaban Responden Variabel Kompetensi Aparatur Desa



Sumber: hasil olah data (2020)

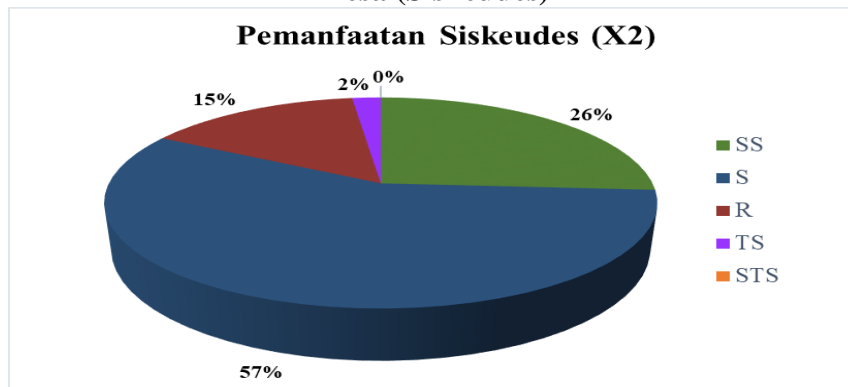
Kemudian untuk hasil analisis statistik deskripsi mengenai pemanfaatan sistem keuangan desa secara visualisasi disajikan pada gambar 3 dan gambar 4.

Gambar 3. Daerah Kriteria Variabel Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)



Sumber: hasil olah data (2020)

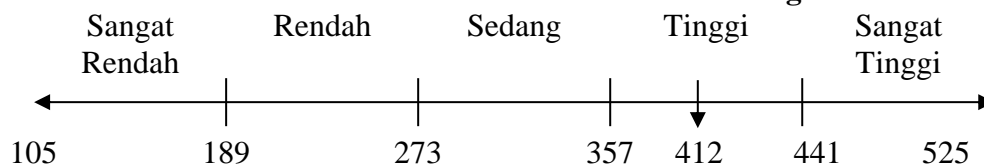
Gambar 4. Persentase Jawaban Responden Variabel Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)



Sumber: hasil olah data (2020)

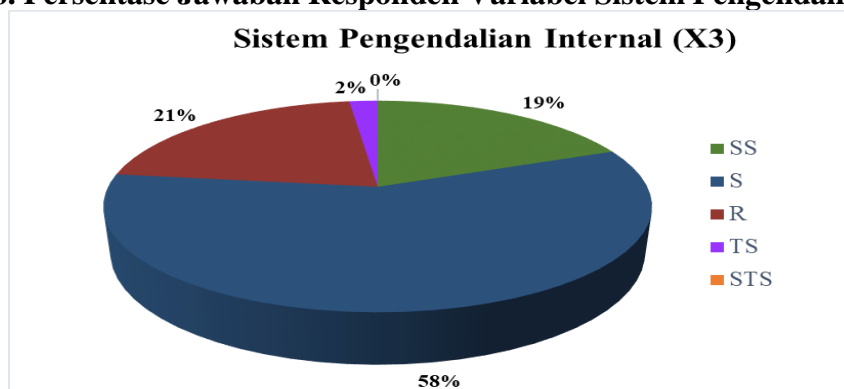
Selanjutnya, hasil analisis statistik deskripsi mengenai sistem pengendalian internal secara visualisasi disajikan pada gambar 5 dan gambar 6.

Gambar 5. Daerah Kriteria Variabel Sistem Pengendalian Internal



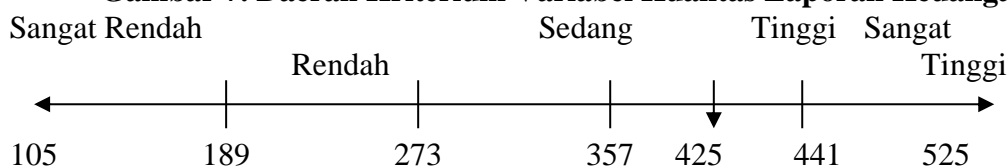
Sumber: hasil olah data (2020)

Gambar 6. Persentase Jawaban Responden Variabel Sistem Pengendalian Internal



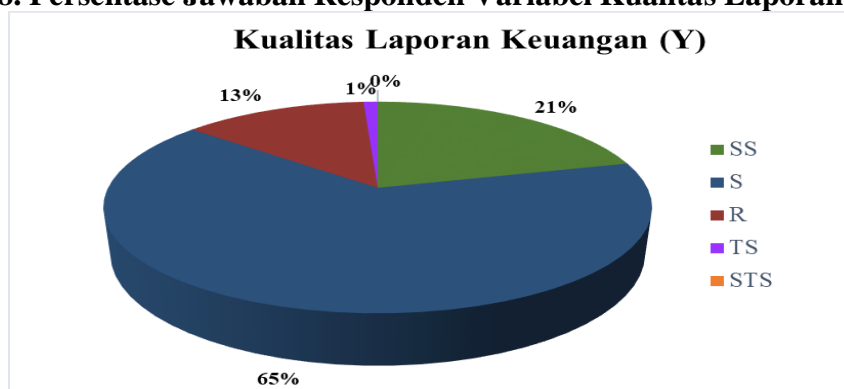
Berikutnya untuk hasil analisis statistik deskripsi mengenai kualitas laporan keuangan secara visualisasi disajikan pada gambar 7 dan gambar 8.

Gambar 7. Daerah Kriteria Variabel Kualitas Laporan Keuangan



Sumber: hasil olah data (2020)

Gambar 8. Persentase Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan



Sumber: hasil olah data (2020)

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS 20.0, diperoleh hasil sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig.
(Constant)	3.384	1.397	.166
Kompetensi Aparatur Desa	.224	3.757	.000
Pemanfaatan Siskeudes	.135	2.259	.026
Sistem Pengendalian Internal	.362	6.190	.000
Adjusted R Square	0,520		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2020)

Berdasarkan hasil *output* SPSS maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = 3,384Y + 0,224X1 + 0,135X2 + 0,362X3 \quad (1)$$

Hasil pengujian determinasi (R^2), dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* sebesar 0,520. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes) dan sistem pengendalian internal sebesar 52% dan sisanya sebesar 48% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Pada uji hipotesis pertama yaitu kompetensi aparatur desa memiliki nilai t_{hitung} 3,757 dengan signifikansi 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,757 > 1,660$ dan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Kemudian pada uji hipotesis kedua yaitu pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes) memiliki nilai t_{hitung} 2,259 dengan signifikansi 0,026. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,259 > 1,660$ dan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya hipotesis yang menyatakan pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Dan pada uji hipotesis ketiga yaitu sistem pengendalian internal memiliki nilai t_{hitung} 6,190 dengan signifikansi 0,000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6,190 > 1,660$ dan signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya hipotesis yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik kompetensi aparatur desa maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Kompetensi aparatur desa menjadi salah satu faktor yang berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi aparatur desa dilihat dari pendidikan pada pemerintah desa di kecamatan Maja dan Talaga bahwa hampir sebagian sudah menempuh jenjang sarjana. Tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah desa akan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik yang berkaitan dengan pelaporan keuangan karena merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai laporan keuangan desa sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan dimana aparat desa sebagai agen mempunyai kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan informasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat atau para pengguna informasi keuangan (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, kondisi demikian sesuai dengan apa yang terdapat dalam teori Stewardship yang memandang bahwa pemerintah desa sebagai steward akan terdorong untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa agar lebih memahami dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sebagai upaya yang terbaik untuk diberikan kepada masyarakatnya (prinsipal). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2019), Agung & Gayatri (2018) dan Puspasari & Purnama (2018) yang

menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem keuangan desa (siskeudes) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem keuangan desa (siskeudes) maka kualitas laporan keuangan semakin baik. Dengan Siskeudes dapat memudahkan dan membantu aparatur pemerintah desa di Kecamatan Maja dan Talaga dalam penyusunan pelaporan keuangan dan pertanggung jawaban pemerintah desa sehingga pekerjaan akan lebih mudah dan tentunya lebih efektif. Selain itu, dengan adanya siskeudes dapat merecord laporan keuangan periode saat ini sehingga apabila tahun depan ingin membandingkan dengan periode sebelumnya terekam dalam file siskeudes. Karena salah satu indikator dari kualitas laporan keuangan dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Dengan dibuatkannya siskeudes maka akan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemanfaatan sistem keuangan desa (Siskeudes) dapat memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan maupun ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan, serta mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi pada penyusunan laporan keuangan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Stewardship, yang memandang bahwa pemerintah desa (steward) sebagai pihak yang dapat dipercaya, memiliki integritas dan kejujuran, serta mampu bertindak dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Untuk mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat atau para pengguna informasi keuangan. Pemerintah desa agar menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dengan memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diharapkan agar tepat waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspasari & Purnama, (2018), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berupa siskeudes dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Rifandi, (2019) dan Julianto & Dewi (2019) bahwa pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) ini akan membantu aparatur desa dalam bekerja lebih efektif dan efisien dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban pemerintah desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan semakin baik sistem pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi. Sistem pengendalian internal merupakan suatu prosedur dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai cara untuk meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa untuk dapat mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Tujuan sistem pengendalian internal adalah melindungi aset desa, memelihara catatan secara rinci dan akurat, untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal. Kebanyakan pemerintah desa di Kecamatan Maja dan Talaga sudah menerapkan Sistem Pengendalian Internal dengan baik namun terdapat beberapa desa yang telah menyalahi prosedur tersebut sehingga melakukan penyelewangan terhadap aset desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah (agen) harus melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga masyarakat akan merasa puas

dengan kinerja pemerintah. Masyarakat juga harus mengetahui mengenai penggunaan dana desa dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Apartur Pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan harus mementingkan kesejahteraan rakyat dan tidak mementingkan untuk kepentingan aparatur desa. Dengan adanya sistem pengendalian internal dapat meminimalisir adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa dan dapat mengurangi konflik dengan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Rahayu (2019), dan Agung & Gayatri (2018) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu (1) kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan semakin baik kompetensi aparatur desa maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan, (2) Pemanfaatan sistem keuangan desa (siskeudes) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan semakin baik pemanfaatan sistem keuangan desa (siskeudes) maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan, (3) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu (1) Diperlukan pembelajaran dan juga pelatihan secara intensif agar aparatur desa memiliki pemahaman teknis dan kompetensi di bidang teknologi informasi. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi aparatur desa yang disesuaikan dengan bidangnya dan juga perkembangan teknologi, (2) Diperlukan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur desa mengenai penggunaan sistem keuangan desa agar aparatur desa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan memanfaatkan sistem keuangan desa, (3) Diperlukan pengawasan yang lebih memadai dari lembaga pengawas yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada tim pengelola keuangan desa agar mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur dan aturan pemerintah. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang semakin baik dan keberjalanan untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab instansi dapat tercapai, (4) Bagi peneliti selanjutnya agar menambah jumlah variabel diluar model penelitian ini dan subjek penelitian yang digunakan alangkah lebih baiknya tidak terpaku pada pemerintah desa, namun dapat menggunakan subjek penelitian lainnya dengan lingkup wilayah yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. M., & Gayatri. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 23(2), 1253–1276.
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2018). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang*. Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program

- Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik Dan Ekonomi, 89–103. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42.
- Karmila, Tanjung, A. R., & Darlis, E. (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah*. *SOROT*, 9(1), 95–104.
- Kartika, M., & Firmansyah, T. (2019). *ICW Ungkap 264 Kasus Korupsi Dana Desa*. <https://nasional.republika.co.id/berita/q13vj1377/icw-ungkap-264-kasus-korupsi-dana-desa>
- Kurniawan, O., & Priyanto, T. I. (2019). *Gelapkan Dana Desa, 2 Eks Kades di Majalengka Ditetapkan Tersangka*. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/ciremaiday/gelapkan-dana-desa-2-eks-kades-di-majalengka-ditetapkan-tersangka-1550757813561908354/full>
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Ejournal.Unsrat*, 98–109.
- Nurillah, A. S. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 3(2), 200–212.
- Pemerintah, P. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah*. 1–2. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Pramudityo, B. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Tegal) [Universitas Muhammadiyah Surakarta]*. In Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/51796/>
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). *Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719>
- Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Rachmawati, S. D., & Fardinal. (2017). *Pengaruh Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)*. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(3), 426–437.

- <https://doi.org/10.22441/journal%20profita.v10i3.2841>
- Radarcirebon.com. (2017). Diduga Selewengkan Dana Bantuan Desa, 2 Mantan Kades Ditahan. *Radarcirebon.Com*. <https://www.radarcirebon.com/2017/04/18/diduga-selewengkan-dana-bantuan-desa-2-mantan-kades-ditahan/>
- Radarcirebon.com. (2019). Majalengka Raih WTP Enam Kali Berturut-turut. *Radarcirebon.Com*. <https://www.radarcirebon.com/2019/05/29/majalengka-raih-wtp-enam-kali-berturut-turut/>
- Rifandi, Z. W. (2019). *Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)*. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 04(01), 1–17.
- Rohman, A., Daud, R., & Ubaidillah, U. (2018). *Analisis Pengaruh Laporan Hasil Pemeriksaan, Diskresi AkruaL Dan Tingkatan AkruaL Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 486–512. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.009>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis (6 (1))*. Salemba Empat.
- Setiyawati, H., & Hoesada, J. (2019). *Penyusunan Laporan Keuangan Desa dengan Format Akuntansi Desa di Kelurahan Rawa Buaya*. *Jurnal Abdi Masyarakat (JAM)*, 4(2), 9–11. <https://doi.org/10.22441/jam.2019.v4.i2.002>
- Sisdianto, E., & Nengsih, N. (2017). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Realisasi Belanja Modal, dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu)*. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 10(1), 48–67. <https://doi.org/10.22441/journal%20profita.v10i1.2894>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018)*. *Jurnal E-Proceeding Of Management*, 6(1), 660–667.
- Undang-Undang, R. I. (2014). *Desa*.
- Utama, R. J., Tanjung, A. R., & Sofyan, A. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *JOMFekom*, 4(1), 843–857.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–67. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>